

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis maka dapat disimpulkan bahwa anak penderita kleptomania tidak dapat mengontrol perbuatannya. Orang yang tidak dapat mengontrol perbuatannya berarti tidak memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka pemidanaan terhadap anak kleptomania adalah tidak benar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis diakhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran agar hakim harus lebih berhati-hati dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak-anak sebab kematangan otak anak yang belum sempurna sehingga lebih baik menghadirkan ahli jiwa dalam setiap persidangan anak. Hakim sebaiknya memberikan treatment atau perawatan bukan pemidanaan dengan memasukkan pelaku anak tersebut ke rumah sakit jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.t. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono , 1979, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984 *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- R.N. Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sri Widowati Soekanto, 1984, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta.
- Suharto RM. , 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

**Makalah/ Jurnal:**

Elias Aboujaoude, Nona Gamel, Lorrin M. Koran, 2004, *Overview of Kleptomania and Phenomenological Description of 40 Patients*, Prim Care Companion, J Clin Psychiatry.

Franck J. Bayle, dkk, 2003, Psychopathology and Comorbidity of Psychiatric In Patients with Kleptomania, The American Journal of Psychiatry.

Rusdian Muslim, 2002, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnostis Gangguan Jiwa di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.

Sudarto, 1987, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Fakultas Hukum UNDIP.

**Website:**

Nungky Gabriel, *Buku PR, Tugas, dan Catatan Sekolah*,  
<http://www.bukupr.com/2012/10/kleptomania-merupakan-suatu-gangguan.html>, 16 September 2013.

Rudy Indrawan, *Asas-asas Dalam Peradilan Anak*,  
<http://rdyfhunlam.blogspot.com/2013/04/asas-asas-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, 4 Juni 2014.

Kamus Kesehatan, <http://kamuskesehatan.com/arti/kleptomania/>, 16 September 2013.

Elly Ingkirawang, *Detik Health*,  
<http://health.detik.com/read/2012/08/08/131241/1986202/1305/2/kapan-kleptomania-bisa-didiagnosis>, tanggal 3 Desember 2013.

**Skripsi / Tesis:**

Dwi Anis Chotimah, 2008, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Budi Nugraha, 2004, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Universitas Diponegoro.

**Artikel dari Surat Kabar:**

Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

